



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Suheri bin Rasyid, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 04 Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai
Pemohon I;

Dan

Miana binti Daim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 04 Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya permohonannya tanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kecamatan Bekri, Kabupaten Bandar Jaya, Provinsi Lampung yang bernama Daim;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Daim (orangtua kandung Pemohon II). Saksi nikahnya masing-masing bernama :

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 1 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Madun (alm), hubungan dengan saksi sebagai kakak Ipar Pemohon II;
4. Giman, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Madiun, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, hubungan dengan saksi sebagai Tetangga Pemohon II; .
5. Bahwa pada pernikahan tersebut mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Basyir (Petugas KUA) Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun. Orangtua kandung Pemohon I masing-masing bernama:
Ayah :Rasyid (alm);
Ibu :Tohera (almh);
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun. Orangtua kandung Pemohon II masing-masing bernama:
Ayah : Daim, umur 90 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
Ibu :Sumia (alm);
8. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali umur Pemohon II yang belum mencapai 17 tahun;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Desa Madiun, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan sekitar pada tahun 2000 pindah ke Desa Niaso, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Andilrawan bin Suheri, laki-laki, umur 35 tahun;
 2. Apriyanto bin Suheri, laki-laki, 32 tahun;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 2 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ArdiLesman bin Suheri, laki-laki, umur 30 tahun;
4. Doni bin Suheri, laki-laki, umur 26 tahun;
5. Dona binti Suheri, perempuan, umur 26 tahun;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa para Pemohon telah mengurus pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan para pemohon hingga sekarang tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan setelah para Pemohon mengeceknya kembali, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Basyir (Petugas KUA) Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tanggal 02 maret 1984 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 3 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Rosmala binti Rasyid**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 02 Kelurahan Rangai Tri Tunggal Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Maret 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Madiun, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Daim;
 - Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Daim;
 - Bahwa saksi nikah yang pertama adalah Komari dan saksi kedua bernama Gimin mereka sudah dewasa dan beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 4 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya; Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada, diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada waktu mau menikah mau diurus oleh Petugas KUA, tetapi setelah 1/2 bulan setelah menikah, petugas tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan, sehingga pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terlaksana;

2. **M. Dodi bin M. Jahyun**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 02 Kelurahan Rangai Tri Tunggal Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Maret 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Madiun, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Daim;
- Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Daim;
- Bahwa saksi nikah yang pertama adalah Komari dan saksi kedua bernama Gimin mereka sudah dewasa dan beragama Islam;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 5 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada, diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada waktu mau menikah mau diurus oleh Petugas KUA, tetapi setelah 1/2 bulan setelah menikah, petugas tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan, sehingga pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terlaksana;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 6 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 7 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

9. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 April 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Madiun, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
10. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Daim;
11. Bahwa ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Daim;
12. Bahwa saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Komari dan Gimin;
13. Bahwa mahar pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah sebelumnya, dan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
15. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan agama untuk menikah;
16. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
17. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis, mereka tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
18. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 8 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada waktu mau menikah mau diurus oleh Petugas KUA, tetapi setelah 1/2 bulan setelah menikah, petugas tersebut telah meninggal dunia karena kecelakaan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1984 di Kecamatan Bekri, Kabupaten Bandar Jaya, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 9 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), maka sudah selayaknya dan seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Sgt - Halaman. 10 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Suheri bin Rasyid) dengan Pemohon II (Miana binti Daim), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1984, di Kecamatan Bekri, Kabupaten Bandar Jaya, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Ma'ripah sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dra. Emaneli, M.H.

Dra. Ma'ripah

2. Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA. Sgt - Halaman. 11 dari 12 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 500.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 616.000,-
(enam ratus enam belas ribu rupiah).		

Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA. Sgt - Halaman. 12 dari 12 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)